

## PROSEDUR PENERBITAN CERTIFICATE OF PRATIQUE (COP) MT. ANIKA PADA PT ADHIGANA PRATAMA MULYA CABANG BELAWAN

<sup>1</sup> Mhd. Raihan Ramadhan,<sup>2</sup> Syarifur Ridho,<sup>3</sup> Lilis

<sup>1,2,3</sup> KPNK

Politeknik Adiguna Maritim Indonesia Medan  
email: [lilismpd21@gmail.com](mailto:lilismpd21@gmail.com)

**Abstrak.** Certificate of Pratique (COP) adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) sebagai bukti bahwa kapal dan awaknya telah memenuhi persyaratan kesehatan dan bebas dari penyakit menular sebelum diizinkan melakukan aktivitas di pelabuhan. Dalam proses penerbitan COP, terdapat beberapa tahapan penting yang dilakukan oleh agen kapal, yaitu pengumpulan dan penyusunan dokumen seperti Maritime Declaration of Health (MDH), crew list, ship sanitation certificate, serta melakukan koordinasi dengan petugas KKP untuk inspeksi lapangan. Selama kegiatan ini, penulis melakukan observasi langsung dan terlibat dalam proses pengurusan dokumen, komunikasi antar instansi, serta memantau proses pemeriksaan hingga COP diterbitkan. Namun demikian, proses ini tidak lepas dari berbagai hambatan seperti cuaca buruk, kru kapal yang menunjukkan gejala penyakit menular, serta kedatangan kapal di luar jam operasional. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif melalui observasi, dokumentasi, Data yang diperoleh dianalisis untuk menggambarkan secara sistematis prosedur penerbitan COP beserta kendala dan solusi yang dilakukan oleh perusahaan.

**Kata Kunci:** Prosedur, COP, Kapal.

**Abstract.** A Certificate of Practice (COP) is an official document issued by the Port Health Office (KKP) as proof that a ship and its crew have met health requirements and are free from infectious diseases before being permitted to conduct activities at the port. In the process of issuing a COP, there are several important stages carried out by the ship agent, namely collecting and compiling documents such as the Maritime Declaration of Health (MDH), crew list, ship sanitation certificate, and coordinating with KKP officers for field inspections. During this activity, the author conducted direct observations and was involved in the document processing process, communication between agencies, and monitoring the inspection process until the COP was issued. However, this process was not free from various obstacles such as bad weather, crew members showing symptoms of infectious diseases, and the arrival of ships outside operating hours. This research was conducted using a qualitative descriptive method through observation, documentation, and analysis of the data obtained to systematically describe the COP issuance procedure along with the obstacles and solutions implemented by the company.

**Keywords:** Procedure, COP, Ship

## PENDAHULUAN

Dalam dunia pelayaran internasional dan nasional, kesehatan masyarakat pelabuhan merupakan aspek yang sangat penting untuk diperhatikan. Pelabuhan tidak hanya menjadi titik temu antar kapal dan daratan, tetapi juga menjadi pintu gerbang keluar masuknya orang, barang, dan berbagai potensi risiko kesehatan masyarakat, termasuk penyakit menular. Salah satu upaya preventif yang dilakukan untuk mengantisipasi masuknya penyakit menular dari kapal ke daratan adalah dengan menerapkan prosedur penerbitan Certificate of Pratique (COP).

Certificate Of Pratique (COP) merupakan sertifikat yang dikeluarkan atas izin bebas karantina yang hendak diberikan kepada kapal yang datangnya dari luar negeri setelah dinyatakan bebas dari risiko penyakit menular dan kebersihan kapal. Menurut Muhandis (2023) Certificate Of Pratique menjadi salah satu syarat agar kapal dapat melanjutkan kegiatan dipelabuhan dikarenakan Certificate Of Pratique sendiri untuk memastikan bahwasanya Crew kapal bebas dari karantina kesehatan, oleh sebab itu jika memang penerbitan Certificate Of Pratique mengalami keterlambatan otomatis akan berimbas kepada kegiatan kapal tidak dapat melakukan bongkar atau muat.

Certificate Of Pratique sangat penting sebagai dokumen legal yang memastikan kapal dalam kondisi higienis dan seluruh awak kapalnya bebas dari penyakit menular yang dapat membahayakan kesehatan masyarakat. Tanpa COP, kapal tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan pelabuhan karena dinilai berisiko. Prosedur penerbitan COP umumnya melibatkan pemeriksaan dokumen kesehatan kapal, pemeriksaan fisik terhadap kebersihan kapal dan kondisi kesehatan kru, serta pengamatan terhadap faktor-faktor risiko lain yang berkaitan dengan karantina kesehatan.

Penerbitan Certificate of Pratique (COP) atau Free Pratique di Indonesia diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan, antara lain Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Peraturan Menteri Kesehatan dan Keputusan Menteri Kesehatan terkait kekarantinaan kesehatan, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Kesehatan.

## METODE PENELITIAN

### A. Riset Lapangan (field research)

#### 1. Metode Observasi

Metode Observasi merupakan metode ilmiah sistematis, metode ini dilakukan secara langsung meninjau kelapangan dimana dalam hal ini penulis mengumpulkan data pengamatan yang dilakukan pada perusahaan PT. Adhigana Pratama Mulya.

#### 2. Metode Dokumentasi

Dokumen adalah suatu laporan tertulis dari suatu peristiwa yang isinya terdiri dari penjelasan dan

pemikiran terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Peneliti juga menggunakan kamera digital untuk mengambil gambar objek yang berhubungan dengan penelitian ada dalam lampiran.

### B. Analisis Pustaka

Dalam metode library research ini penulis memperoleh data dari perpustakaan Poltek AMI Medan untuk mendapatkan data sekunder maupun media lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk menunjang penelitian penulis dalam penyelesaian makalah ini serta membantu penulis dalam memahami istilah dan pengertian mengenai pembahasan yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Prosedur Penerbitan Certificate of Pratique (COP) di kantor kesehatan pelabuhan Belawan pada PT. Adhigan Pratama Mulya Cabang Belawan

#### 1. Pengertian Dari Certificate of Pratique (COP)

Menurut Pazni (2023), Certificate Of Pratique adalah sertifikat izin bebas karantina penting untuk kapal bersandar yang diterbitkan oleh pihak karantina. Apabila dokumen Certificate Of Pratique tidak diterbitkan oleh pihak karantina maka proses sandar kapal tidak bisa dilakukan

Certificate Of Pratique menjadi salah satu syarat agar kapal dapat melanjutkan kegiatan di pelabuhan dikarenakan Certificate Of Pratique sendiri untuk memastikan kesehatan kapal dan crew dalam keadaan baik, oleh sebab itu jika memang penerbitan Certificate Of Pratique mengalami keterlambatan otomatis akan berimbas kepada kesiapan kapal tidak dapat melakukan kegiatan di pelabuhan.

#### 2. Fungsi Certificate of Pratique

- Memberikan jaminan bahwa kapal tidak membawa risiko kesehatan masyarakat
- Mecegah penyebaran penyakit menular lintas Negara
- Sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban Negara dalam pengawasan lalu lintas internasional sesuai regulasi WHO dan hukum nasional.

#### 3. Prosedur Penerbitan Certificate of Pratique

Prosedur penerbitan Certificate of Pratique (COP) merupakan sebuah proses yang mengacu pada rangkaian kegiatan administratif dan teknis yang dilakukan oleh agen kapal dan otoritas pelabuhan dalam hal ini Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) untuk memastikan bahwa sebuah kapal yang baru tiba telah memenuhi persyaratan kesehatan untuk diizinkan beraktivitas di pelabuhan. COP hanya dapat diterbitkan apabila kapal telah melalui prosedur pemeriksaan kesehatan oleh petugas KKP yang

mencakup pemeriksaan dokumen kesehatan kapal seperti Maritime Declaration of Health (MDH), crew list, ship sanitation certificate, serta inspeksi fisik terhadap kondisi kru dan kapal.

Secara hukum, penerbitan COP di Indonesia mengacu pada KepmenKes No.425/Menkes/SK/IV/2007 tentang Penyelenggaraan Karantina Kesehatan, dan secara internasional diatur oleh International Health Regulations (IHR) 2005 dari World Health Organization (WHO). Aturan tersebut menegaskan bahwa COP merupakan bentuk pengawasan negara terhadap kapal asing dan domestik yang masuk wilayah pelabuhan untuk mencegah penyebaran penyakit menular lintas negara.

Berikut adalah Proses penerbitan billing PNBP Certificate of Pratique (COP) pada sistem SINKARKES oleh PT. Adhigana Pratama Mulya Cabang Belawan :

- a. Membuat permohonan melalui aplikasi SINKARKES
- b. Upload data dokumen:
  - 1) MDH (Master Declaration Of Health)
  - 2) SSSC/SSCEC
  - 3) Sertifikat obat-obatan (Medicine Certificate)
  - 4) Daftar awak kapal/crew list
  - 5) Voyage Memo
  - 6) Last Port Clearance
- c. Aplikasi SINKARKES akan mengeluarkan billing PNBP yang harus dibayarkan oleh pengguna jasa. Pembayaran billing PNBP dapat melalui teller bank, mobile banking, internet banking. Biaya penerbitan Certificate Of Pratique (COP) Sesuai peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 64 tahun 2019 tentang jenis dan tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kementrian Kesehatan Republik Indonesia sebagai berikut:
  - 1) Kapal > 7 sd 100 GT Rp. 50.000,-
  - 2) Kapal > 100 - 200 GT Rp. 60.000,-
  - 3) Kapal > 200 - 350 GT Rp. 70.000,-
  - 4) Kapal > 350 - 1.000 GT Rp. 85.000,-
  - 5) Kapal > 1.000 - 2.000 GT Rp. 120.000,-
  - 6) Kapal > 2.000 – 3.500 GT Rp. 150.000,-
  - 7) Kapal > 3.500 – 7.000 GT Rp. 175.000,-

- 8) Kapal > 7.000 – 10.000 GT Rp. 200.000,-
- 9) Kapal > 10.000 – 15.000 GT Rp. 250.000,-
- 10) Kapal > 15.000- 20.000 GT Rp. 275.000,-
- 11) Kapal > 20.000 GT Rp. 300.000,-

Secara praktis, prosedur penerbitan Certificate of Pratique (COP) di Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Belawan terhadap kapal MT. Anika yang diurus oleh PT. Adhigana Pratama Mulya dilakukan melalui enam tahapan utama.

- a. Agen atau nahkoda kapal melakukan pengajuan permohonan COP secara daring melalui SINKARKES atau tertulis, sekurang-kurangnya 24 jam sebelum kedatangan kapal.
- b. Petugas KKP melakukan verifikasi terhadap dokumen yang diserahkan, termasuk Master Declaration of Health, SSCEC, Medicine Certificate, Crew List, Voyage Memo, dan Last Port Clearance.
- c. Petugas menerbitkan tagihan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai tarif yang berlaku melalui sistem SINKARKES.
- d. Dilakukan pemeriksaan fisik oleh petugas KKP secara langsung ke atas kapal guna memastikan tidak terdapat potensi risiko penyebaran penyakit menular dan memastikan kebersihan kapal.
- e. Apabila tidak ditemukan indikasi masalah kesehatan, COP akan diterbitkan, namun jika ditemukan gejala yang mencurigakan, petugas akan mengambil langkah karantina sesuai prosedur.
- f. COP diserahkan kepada agen atau nahkoda kapal dalam bentuk digital atau cetak sebagai bukti bahwa kapal telah memenuhi syarat karantina kesehatan untuk melakukan kegiatan di pelabuhan.

#### 4. Dokumen Kesehatan Kapal Dalam Pengurusan Certificate of Pratique (COP)

- a. Sertifikat (SSCEC)

Ship Sanitation Control Exemption Certificate (SSCEC) adalah dokumen kesehatan yang di berikan kepada alat angkut kapal yang setelah di lakukan pemeriksaan kapal dari tim kantor kesehatan pelabuhan dan di nyatakan kapal bebas dari tanda-tanda

kehidupan tikus, SSCEC berlaku selama 6 bulan.

b. Maritime Declaration of Health (MDH)

Dokumen ini berisi pernyataan dari nahkoda mengenai kondisi kesehatan seluruh awak kapal dan penumpang (jika ada). Dalam MDH dicantumkan apakah terdapat gejala penyakit menular selama perjalanan, kru yang sakit, atau ada kematian di kapal. Dokumen ini wajib diisi secara jujur dan lengkap karena menjadi salah satu dasar utama bagi petugas KKP untuk menentukan langkah pemeriksaan lebih lanjut.

c. Crew List (Daftar Awak Kapal)

Merupakan daftar resmi seluruh awak kapal yang berada di atas kapal MT. Anika, lengkap dengan data identitas, kewarganegaraan, dan jabatan masing-masing. Crew list diperlukan untuk mencocokkan data dengan pemeriksaan fisik dan untuk keperluan pelacakan apabila ditemukan kru dengan gejala penyakit menular.

d. Voyage Memo

Sebelumnya Informasi ini mencatat pelabuhan mana saja yang disinggahi kapal sebelum tiba di Pelabuhan Belawan. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi apakah kapal berasal dari wilayah-wilayah yang sedang terdampak wabah penyakit, sehingga dapat meningkatkan kewaspadaan petugas KKP.

e. Medicine List/Medicine Chest

Adalah peralatan dan certificate yang wajib ada di atas kapal tujuannya untuk menyelamatkan nyawa meringankan penderita korban seperti meringankan rasa nyeri, mencegah cedera atau penyakit bertambah seperti pencegahan pendarahan, mempertahankan daya tahan korban, menunjang upaya penyembuhan, mencari pertolongan lebih lanjut.

f. Buku Kesehatan Kapal (Health Book)

Adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Balai Kekejarantinaan Kesehatan dan berfungsi sebagai alat koordinasi antara pihak karantina dengan nahkoda kapal. Buku ini mencatat status kesehatan kapal, termasuk hasil pemeriksaan sanitasi dan status bebas hama, serta informasi penting lainnya terkait kesehatan kapal selama pelayaran

g. Last port clearance

Last port clearance adalah surat izin berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar (harbour master) di pelabuhan sebelumnya, yang menyatakan bahwa kapal telah memenuhi semua persyaratan administratif dan teknis untuk meninggalkan pelabuhan tersebut. Dokumen ini diserahkan kepada nahkoda kapal saat akan meninggalkan pelabuhan, dan menjadi bukti bahwa kapal tersebut sah untuk berlayar menuju tujuan.

## 5. Instansi Terkait dalam Penerbitan Certificate of Pratique ( COP )

Instansi yang terkait dalam proses penerbitan Certificate of Pratique (COP) Adalah pihak Balai Besar Kekejarantinaan Kesehatan (BBKK)/Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP). Pihak Balai Besar Kekejarantinaan Kesehatan (BBKK) / Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) yang melaksanakan tugas dibidang cegah tangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan. KKP dipimpin oleh seorang kepala dan dalam melaksanakan tugas secara administratif dibina oleh Sekretaris Direktorat Jendral dan secara fungsional dibina oleh Direktorat di lingkungan Direktorat Jendral pencegahan dan pengendalian penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

## 6. Kendala dan Hambatan dalam penerbitan Certificate of Pratique

Dalam proses operasional di dunia pelayaran, khususnya terkait penerbitan Certificate of Pratique (COP), berbagai hambatan tidak dapat dihindari. Meskipun PT. Adhigana Pratama Mulya Cabang Belawan telah memiliki sistem kerja yang terstruktur dan personel yang berpengalaman, namun pelaksanaan di lapangan tetap dihadapkan pada kendala-kendala yang sifatnya teknis, situasional, maupun administratif. Selama kegiatan magang dan observasi pada proses pengurusan COP kapal MT. Anika, penulis mencatat beberapa hambatan utama yang sering dihadapi oleh perusahaan, yaitu:

a. Cuaca Buruk

Cuaca buruk merupakan hambatan yang sangat berpengaruh dalam proses pemeriksaan kapal. Ketika terjadi hujan deras, angin kencang, atau gelombang tinggi, petugas dari Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) tidak dapat melakukan inspeksi fisik ke kapal secara langsung karena alasan keselamatan. Hal ini mengakibatkan proses pemeriksaan tertunda dan berdampak pada keterlambatan penerbitan COP. Dalam situasi ini, perusahaan harus menjadwalkan ulang

pemeriksaan dan kembali berkoordinasi dengan KKP. Akibatnya, kapal tidak dapat segera melakukan aktivitas seperti bongkar muat ataupun pergantian kru, yang dapat menyebabkan kerugian waktu dan biaya.

b. Kru Kapal

Menunjukkan Gejala Penyakit Menular Salah satu syarat utama penerbitan COP adalah tidak adanya kru atau awak kapal yang menunjukkan gejala penyakit menular. Dalam kasus MT. Anika, pernah terjadi situasi di mana salah satu awak kapal mengalami demam tinggi dan batuk berat saat kedatangan. Petugas KKP pun langsung melakukan tindakan lanjutan berupa pemeriksaan kesehatan tambahan, dan meminta pihak agen untuk menunda aktivitas kapal sampai hasil pemeriksaan keluar. Situasi ini menjadi kendala serius karena selain menunda penerbitan COP, hal tersebut juga dapat menimbulkan kekhawatiran akan adanya penyebaran penyakit di pelabuhan. Pihak perusahaan harus cepat mengambil tindakan, seperti memfasilitasi pemeriksaan lanjutan, isolasi sementara kru yang sakit, dan menyampaikan laporan kesehatan tambahan ke KKP.

c. Kedatangan Kapal di Luar Jam Operasional KKP

Jam kerja Kantor Kesehatan Pelabuhan umumnya terbatas pada hari dan jam kerja normal (Senin–Jumat, pukul 08.00–16.00). Apabila kapal tiba di luar waktu tersebut, misalnya malam hari, akhir pekan, atau hari libur nasional, maka proses pemeriksaan tidak bisa langsung dilakukan. Kapal harus menunggu hingga jam operasional berikutnya untuk dilakukan pemeriksaan, yang berarti proses penerbitan COP tertunda secara otomatis. Meskipun ada sistem pengajuan pemeriksaan darurat, namun dalam praktiknya tidak selalu bisa diakomodasi, apalagi jika jadwal kedatangan tidak diinformasikan lebih awal

**7. Solusi mengatasi kendala dan hambatan dalam pengurusan Certificate of Pratique (COP)**

Solusi yang dapat di hadapi jika terjadi kendala saat penerbitan Certificate of Pratique antara lain :

- a. Melakukan pemeriksaan Secara daring (remote inspection)

Jika cuaca buruk menghambat petugas naik ke kapal, otoritas karantina dapat melakukan pemeriksaan awal menggunakan teknologi komunikasi seperti video call atau drone, untuk memastikan tidak ada gejala penyakit menular dari kru kapal. Setelah cuaca membaik, pemeriksaan fisik lanjutan dapat dilakukan untuk verifikasi, sebelum Certificate of Pratique diterbitkan secara resmi.

- b. Memastikan Kesehatan kapal dan crew kapal

Agensi harus komunikasi terlebih dahulu kepada pihak kapal sebelum kapal tiba di pelabuhan. Namun, jika ditemukan kru kapal yang terjangkit penyakit menular, maka otoritas karantina pelabuhan harus segera menginstruksikan isolasi terhadap kru tersebut di ruang medis kapal atau fasilitas karantina terdekat.

- c. Koordinasi dengan instansi terkait

Membangun hubungan yang baik dengan KKP dan instansi maritim lain sangat penting untuk memperlancar proses penerbitan Certificate kapal.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil observasi, pengalaman selama praktik, serta analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa prosedur penerbitan Certificate of Pratique (COP) merupakan proses yang sangat penting dalam mendukung kelancaran operasional kapal di pelabuhan. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala yang dihadapi, salah satunya adalah kondisi cuaca buruk yang tidak mendukung saat inspeksi, sehingga dapat menunda kedatangan petugas atau menyebabkan proses inspeksi tidak dapat dilakukan sesuai jadwal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ginting, D., Sembiring, M. E. B., & Lilis, L. (2025). TANGGUNG JAWAB BAGIAN OPERASIONAL TERHADAP PENANGANAN MUATAN CURAH CAIR PADA PT. USDA SEROJA JAYA CABANG BATAM. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 7(1), 814-818.
- Ginting, D., Taruna, T., & Raja, B. (2022). IZIN TINGGAL CREW ASING YANG AKAN BEKERJA DI ATAS KAPAL LAY UP PADA PT. ANSARI SHIPPING BATAM DI

PELABUHAN BATU AMPAR. Journal of Maritime and Education (JME), 4(2), 400-406.

Habeahan, H. R., & Lilis, L. (2024). Kinerja Agen Diatas Kapal Dalam Menangani Kedatangan Dan Keberangkatan Kapal Di Pt. Putra Andalas Samudera Dumai. Journal of Maritime and Education (JME), 6(1), 615-626.

Kalangi, Ester., MH.2024. Administrasi Pekayaran Niaga. Surabaya: Sucopindo.

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 425/MENKES/SK/IV/2007 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di Kantor Kesehatan Pelabuhan, Jakarta:KEMENKES.2007.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2023). Penerbitan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring. Diakses pada 20 Juli 2025 dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penerbitan>

Lilis, L., Dirhamsyah, D., Fransiska, E., & Sartika, D. (2023). PELAKSANAAN EKSPOR IKAN PARI KE NEGARA SINGAPORE PADA CV. INDO PACIFIC JAKARTA. Journal of Maritime and Education (JME), 5(1), 469-474.

Lilis, L., Siregar, N. S., & Abdullah, P. (2022). TATA CARA PERPANJANGAN SERTIFIKAT KONSTRUKSI KAPAL PADA KANTOR KSOP (KESYAHBANDARAN DAN OTORITA PELABUHAN) KELAS I DUMAI OLEH PT. WASAKA INDONESIA JAYA DUMAI. Journal of Maritime and Education (JME), 4(1), 318-324.

Lilis, L., & Fadillah, N. (2021). PROSEDUR PENANGANAN CREW KAPAL ASING YANG MASUK KE PERAIRAN INDONESIA PADA PT. BAHARI EKA NUSANTARA CABANG BATAM. Journal of Maritime and Education (JME), 3(1), 168-175.

Lilis, L., & Rizki, M. U. (2022). AKTIVITAS PELAYANAN PENUMPANG KAPAL KM. WIRA ONO NIHO DI DERMAGA PELABUHAN PADA KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV SIBOLGA. Journal of Maritime and Education (JME), 4(2), 394-399.

Lasse. D.A. Manajemen Muatan Aktivitas Rantai Pasok Di Area Pelabuhan. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014.

Mulyadi. 2016. Sistem Akuntansi. Jakarta Selatan: Salemba Empat.

Muhandis. F. 2023. Analisis Keterlambatan Penerbitan Dokumen Certificate Of Practique terhadap Efisiensi Masuknya Kapla Sungai Kapuas Pontianak. SKRIPSI. Program Studi Transportasi Laut Politeknik Pelayaran. Sumatera Barat.

Pazni. S. R. 2023. Analisis Keterlambatan Penerbitan Dokumen Certificate Of Practique di Kapal Charter Pertamina Trans Kontinental di Teluk Kabung. SKRIPSI. Program Studi Transportasi Laut Politeknik Pelayaran. Sumatera Barat.

Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan No. 17/PB/2021, Tata Cara Penerbitan Kode Billing melalui Billing Perbendaharaan.

Pedoman Praktek Darat dan Penulisan Makalah Poltel AMI Medan, 2024

Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Kementerian Kesehatan. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.

World Health Organization. (2008). International Health Regulations (2005) (2nd ed.). World Health Organization.

Taruna, T., Sinaga, M. A., & Lilis, L. (2024). PROSES PENERBITAN SURAT PERSETUJUAN BELAYAR (PORT CLEARANCE) PADA KAPAL DI KANTOR KESYAHBANDARAN OLEH PT. PELAYARAN SEMESTA SEJAHTERA LESTARI BELAWAN. Journal of Maritime and Education (JME), 6(1), 561-567.